



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA

TESIS

ANALISIS PERSEPSI KESIAPAN PEGAWAI PENGAWAS  
KETENAGAKERJAAN DI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI RI DAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROPINSI DKI JAKARTA DALAM PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOBA (P4GN)

OLEH

NAMA : MUCHAMAD YUSUF  
NPM : 6903 400 302

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
MENCAPAI GELAR MAGISTER SAINS (M.Si.) DALAM  
ILMU ADMINISTRASI

JAKARTA  
2005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas limpahan karunia NYA lah penulis dapat menyelesaikan penelitian sebagai dasar pembuatan tesis yang berjudul: " Analisis Persepsi Kesiapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta Dalam Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)". Tesis ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas-tugas untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelas Magister Sains (M.Si) dari Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
2. Pimpinan Badan Narkotika Nasional yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan melalui beasiswa dari BNN,
3. Bapak Henry Faisal Noor, MBA. selaku pembimbing yang secara intensif memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOK, Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selaku atasan yang telah memberi kemudahan, dorongan dan kesempatan yang luas bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana.
5. Pimpinan dan rekan-rekan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. DKI Jakarta yang telah bersedia dan membantu menjadi responden.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan ibu staff administrasi Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberi bantuan dan berbagai kemudahan dalam aktivitas selama perkuliahan.
8. Bapak, Ibu dan adik-adik yang telah memberikan dukungan moril selama penulis mengikuti perkuliahan dan penulisan tesis.
9. Istri dan anak-anak yang telah berkorban waktu dan memberi dorongan dan doa.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, namun karena berbagai keterbatasan sebagai manusia, maka

terdapat masih banyak kekurangan-kekurangan, dan untuk itu segala kritik dan saran akan penulis terima dengan hati terbuka. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat khususnya bagi pelaksanaan P4GN dikemudian hari.

Jakarta, Juli 2005

Muchamad Yusuf

Perpustakaan BNI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan penelitian	5
1.3.2 Manfaat penelitian	5
1.3.3. Batasan masalah	6
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIS</b>	<b>8</b>
2.1 Kebijakan Publik	8
2.2 Evaluasi Kebijakan Publik	11
2.2.1 Kriteria evaluasi menurut Bourn ( 1994 )	12
2.2.2 Kriteria evaluasi menurut Dunn ( 1999 )	16
2.2.3 Model input/output	17
2.2.4 Masalah dalam melakukan evaluasi kebijakan	18
2.3 Efektifitas Kebijakan Publik	21

2.3.1	Pengertian efektivitas	21
2.3.2	Pengukuran efektivitas kebijakan	22
2.4	Perlindungan tenaga kerja	28
2.4.1	Kaidah ILO dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja	30
2.4.2	Peran Organisasi Pengusaha	33
2.4.3	Peran Serikat Pekerja	34
BAB III	Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia	36
3.1	Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)	36
3.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	42
3.3	Penyalahgunaan Narkoba	47
3.4	Pengawasan Ketenagakerjaan	49
BAB IV.	METODE PENELITIAN	57
4.1.	Lokasi penelitian	57
4.2	Populasi dan Sampel	58
4.2.1.	Populasi	58
4.2.2	Sampel dan responden	58
4.3	Metode Pengumpulan Data	58
4.4	Pengolahan dan Analisis Data	59
4.5	Kerangka Penelitian	61
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1.	Evaluasi peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan	66
5.1.1.	Kegiatan yang dilakukan bersama / koordinasi antar instansi dalam P4GN	66

5.1.2. Kecukupan / kesiapan organisasi pengawasan ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan P4GN.	70
5.2 Evaluasi Terhadap Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkoba	76
5.3. Evaluasi Peningkatan Pendayagunaan Potensi Dan Kemampuan Masyarakat	84
5.3.1 Kecukupan tingkat partisipasi kegiatan serikat pekerja/buruh dalam melakukan kegiatan P4GN	84
5.3.2 Kecukupan tingkat laporan serikat pekerja/buruh, LSM dan pengusaha tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh tenaga kerja kepada sudin pengawasan ketenagakerjaan	86
5.4. Evaluasi Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku	88
5.4.1. Persentase aparat pengawas yang mengetahui jenis narkoba	89
5.4.2. Tingkat kephahaman pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap bahaya narkoba di tempat kerja	92
5.4.3 Persentase sikap yang setuju dengan pelaksanaan program P4GN di tempat kerja yang melibatkan pekerja dan pengusaha	99
5.4.4 Persentase sikap yang setuju terhadap terapi dan rehabilitasi pekerja korban narkoba	105
5.4.5 Persentase pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan pembinaan dalam pencegahan narkoba di lingkungan kerja.	111
5.5 Evaluasi Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	116

BAB VI	PENUTUP	121
	6.1. Kesimpulan	121
	6.2. Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN	129

Perpustakaan BNN

## DAFTAR TABEL

No.		halaman
Tabel 2.1.	Lima Tahapan Dalam Siklus Kebijakan Dan Hubungannya Dengan Penerapan Problem Solving	10
Tabel 2-2	Kriteria Evaluasi Yang Diajukan Dunn	16
Tabel 4.1	Definisi Dan Penilaian Hasil Evaluasi	61
Tabel 4.2	Matriks Hubungan Antara Tujuan, Hasil Dan Indikator	64
Tabel 5.1.	Pernyataan Responden Terhadap Kecukupan Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dilakukan Antar Instansi Dalam Badan Narkotika Propinsi (BNP) Atau Badan Narkotika Nasional ( BNN )	67
Tabel 5.2.	Jawaban Responden Adanya Pertemuan Berkala Setiap Tahun Dalam BNP Atau BNN	67
Tabel 5.3.	Jawaban Responden Mengenai Jumlah Pertemuan Berkala Setiap Tahun Dalam BNP Atau BNN	68
Tabel 5.4.	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Adanya Keterlibatan Organisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Penyusunan Kebijakan Atau Program Kegiatan Badan Narkotika Propinsi (BNP) Atau Badan Narkotika Nasional ( BNN )	69
Tabel 5.5.	Penilaian Indikator Kegiatan Yang Dilakukan Bersama / Koordinasi Antar Instansi Dalam P4GN	70
Tabel 5.6.	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Bimbingan Teknis Bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pencegahan Narkoba	71
Tabel 5.7.	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Anggaran Bagi Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Tempat Kerja	72
Tabel 5.8	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Pegawai Yang Terlatih Bagi Kegiatan Pencegahan Narkoba Di Tempat Kerja	72
Tabel 5.9	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Peralatan Penunjang Bagi Kegiatan Pencegahan Narkoba Di Tempat Kerja	73

Tabel 5.10.	Penilaian Terhadap Indikator Kecukupan / Kesiapan Organisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Pelayanan P4GN	74
Tabel 5.11	Penilaian Terhadap Intermediate Outcome Berupa Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijaksanaan Dan Pelaksanaan P4GN	75
Tabel 5.12.	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Pekerja/Buruh Yang Terbukti Menyalahgunakan Narkoba Di Tempat Kerja Dapat Di Lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	76
Tabel 5.13.	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Undang – Undang Tentang Narkotika Adalah UU No. 22 Thn 1997	77
Tabel 5.14	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: UU Tentang Psikotropika Adalah UU No. 5 Thn 1997	77
Tabel 5.15	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Apakah Pekerja Yang Menjadi Pengguna Narkoba Di Masa Lalu Tidak Dapat Di Lakukan Pemutusan Hubungan Kerja	78
Tabel 5.16	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Bahwa Mantan Pecandu Dapat Diterima Bekerja Pada Perusahaan	79
Tabel 5.17	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Bahwa Korban Narkoba Atau Keluarganya Wajib Melapor Ke Instansi Pemerintah Untuk Mendapat Perlindungan, Terapi Dan Rehabilitasi.	80
Tabel 5.18	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan: Bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Berkewajiban Memberi Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Korban Narkoba Yg Melapor Berupa Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Pekerja Tersebut.	81
Tabel 5.19	Penilaian Terhadap Pemahaman Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Di DKI Jakarta Yang Memahami Tentang Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Narkoba	82
Tabel 5.20	Tanggapan Responden Terhadap Keterlibatan / Kepedulian Serikat Pekerja/Buruh Atau LSM Dalam Kegiatan P4GN Di Tempat Kerja.	85

**Laporan lengkap tersedia  
di Perpustakaan BNN**